

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

TERHADAP

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2025**

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA

TERHADAP

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIROHMANIRROHIM.

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

YANG TERHORMAT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
YANG KAMI HORMATI SAUDARA BUPATI,
YANG KAMI HORMATI SAUDARI WAKIL BUPATI,
YANG KAMI HORMATI SAUDARA SEKRETARIS DAERAH,
YANG KAMI HORMATI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH,
YANG KAMI HORMATI KETUA PENGADILAN NEGERI DAN KETUA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN,
YANG KAMI HORMATI STAF AHLI BUPATI, ASISTEN DAERAH, KEPALA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL,
PIMPINAN BUMD, INSAN PERS, PIMPINAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, DAN SELURUH UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

PADA KESEMPATAN TERHORMAT DAN BERBAHAGIA INI, KAMI
SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA BUPATI BESERTA
SELURUH JAJARAN YANG TELAH BEKERJA KERAS DALAM MENYUSUN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

KAMI SAMPAIKAN JUGA UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN
RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN
KEPADA KAMI, UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI GERINDRA TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

FRAKSI GERINDRA MENGUCAPKAN SELAMAT HARI BHAYANGKARA KE-80! TERIMA KASIH ATAS DEDIKASI TANPA HENTI DALAM MELINDUNGI, MENGAYOMI, DAN MELAYANI MASYARAKAT. POLRI PRESISI UNTUK NEGERI!

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD MERUPAKAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SERTA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH KEPADA MASYARAKAT MELALUI DPRD.

FRAKSI PARTAI GERINDRA BERPANDANGAN BAHWA PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD TIDAK HANYA DIMAKNAI SEBAGAI PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN, MELAINKAN MENJADI MOMENTUM PENTING UNTUK MENGEVALUASI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DAERAH, KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN, SERTA SEJAUH MANA PELAKSANAAN APBD MAMPU MENJAWAB KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH.

FRAKSI PARTAI GERINDRA BERPANDANGAN BAHWA KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TIDAK HANYA DIUKUR DARI TERCAPAINYA TARGET PENDAPATAN, TINGGINYA REALISASI BELANJA, MAUPUN DIPEROLEHNYA OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. KEBERHASILAN YANG SESUNGGUHNYA ADALAH KETIKA APBD MAMPU MEMPERKUAT KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH, MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI, MENGURANGI KEMISKINAN,

MEMPERLUAS KESEMPATAN KERJA, SERTA MENGHADIRKAN KESEJAHTERAAN YANG BENAR-BENAR DIRASAKAN OLEH SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN.

PIMPINAN SIDANG DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

FRAKSI PARTAI GERINDRA MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN ATAS KEBERHASILANNYA MENINGKATKAN OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DARI WAJAR DENGAN PENGECCUALIAN (WDP) PADA TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP) PADA TAHUN ANGGARAN 2025.

PENINGKATAN OPINI TERSEBUT MENUNJUKKAN ADANYA KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMPERBAIKI TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH SERTA MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

NAMUN DEMIKIAN, FRAKSI PARTAI GERINDRA BERPANDANGAN BAHWA OPINI WAJAR TANPA PENGECCUALIAN BUKANLAH TUJUAN AKHIR, MELAINKAN SEBUAH INSTRUMEN UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN BAIK. KEBERHASILAN TERSEBUT HARUS DIWUJUDKAN DALAM BENTUK MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN, MENINGKATNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT, SERTA SEMAKIN KUATNYA KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH.

PIMPINAN SIDANG DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

PENDAPATAN DAERAH

FRAKSI PARTAI GERINDRA BERPANDANGAN BAHWA KEMAMPUAN DAERAH DALAM MENGHIMPUN PENDAPATAN MERUPAKAN SALAH SATU INDIKATOR PENTING KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. PENDAPATAN DAERAH YANG KUAT AKAN MEMBERIKAN RUANG FISKAL YANG LEBIH LUAS BAGI PEMERINTAH

UNTUK MEMBIAYAI PEMBANGUNAN, MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, SERTA MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

BERDASARKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025, PENDAPATAN DAERAH DITARGETKAN SEBESAR RP2,825 TRILIUN DAN TEREALISASI SEBESAR RP2,641 TRILIUN ATAU MENCAPI SEKITAR 93,50 PERSEN DARI TARGET.

SECARA UMUM CAPAIAN TERSEBUT PATUT DIAPRESIASI. NAMUN DEMIKIAN, FRAKSI PARTAI GERINDRA MENCERMATI MASIH TERDAPAT BEBERAPA KOMPONEN PENDAPATAN YANG BELUM MENCAPI TARGET SEHINGGA MEMERLUKAN PERHATIAN DAN EVALUASI BERSAMA.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH DITARGETKAN SEBESAR RP479,05 MILIAR, SEDANGKAN REALISASINYA SEBESAR RP379,88 MILIAR ATAU SEKITAR 79,30 PERSEN.

FRAKSI PARTAI GERINDRA MENILAI CAPAIAN TERSEBUT MENUNJUKKAN BAHWA TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN KUNINGAN MASIH PERLU TERUS DIPERKUAT. KETERGANTUNGAN TERHADAP PENDAPATAN TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH PROVINSI MASIH RELATIF TINGGI SEHINGGA RUANG GERAK FISKAL DAERAH MENJADI TERBATAS.

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH HENDAKNYA DILAKUKAN BUKAN DENGAN MEMBEBANI MASYARAKAT MELALUI KENAIKAN TARIF, TETAPI MELALUI PEMBENAHAN SISTEM PENGELOLAAN PENDAPATAN, DIGITALISASI PELAYANAN, PEMBARUAN BASIS DATA OBJEK PAJAK DAN RETRIBUSI, OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DAERAH, SERTA PENGUATAN PENGAWASAN TERHADAP POTENSI KEBOCORAN PENERIMAAN.

FRAKSI PARTAI GERINDRA MEYAKINI BAHWA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MERUPAKAN SALAH SATU KUNCI UNTUK MEMPERKUAT KEMAMPUAN KABUPATEN KUNINGAN DALAM MEMBIYAI PEMBANGUNAN SECARA MANDIRI DAN BERKELANJUTAN.

PAJAK DAERAH

FRAKSI PARTAI GERINDRA MENGAPRESIASI BEBERAPA JENIS PAJAK DAERAH YANG MAMPU MEMENUHI BAHKAN MELAMPAUI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2), SERTA PAJAK REKLAME MENUNJUKKAN KINERJA YANG BAIK DAN PATUT DIPERTAHANKAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

NAMUN DEMIKIAN, BEBERAPA JENIS PAJAK MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN SERIUS.

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) HANYA TEREALISASI SEKITAR 56,47 PERSEN. KONDISI INI PERLU DIEVALUASI MELALUI PEMBARUAN BASIS DATA OBJEK PAJAK, PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SERTA OPTIMALISASI PENGAWASAN TERHADAP TRANSAKSI YANG MENJADI OBJEK BPHTB.

PAJAK AIR TANAH HANYA MENCAPAI SEKITAR 44,81 PERSEN. PEMERINTAH DAERAH PERLU MEMPERKUAT PENDATAAN WAJIB PAJAK, MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMANFAATAN AIR TANAH, SERTA MENOPTIMALKAN PENAGIHAN TERHADAP POTENSI PENERIMAAN YANG BELUM TERGALI.

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB) HANYA TEREALISASI SEKITAR 25 PERSEN. FRAKSI PARTAI GERINDRA MEMANDANG PERLUNYA EVALUASI TERHADAP PENETAPAN TARGET, PENGAWASAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN, SERTA

KOORDINASI YANG LEBIH INTENSIF DENGAN INSTANSI TERKAIT AGAR POTENSI SEKTOR INI DAPAT DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL TANPA MENGABAIKAN ASPEK KELESTARIAN LINGKUNGAN.

SEMENTARA ITU, REALISASI OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR JUGA BELUM MENCAPAI TARGET. PEMERINTAH DAERAH DIHARAPKAN TERUS MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT AGAR POTENSI PENERIMAAN DARI SEKTOR TERSEBUT DAPAT DIOPTIMALKAN.

FRAKSI PARTAI GERINDRA JUGA MENCERMATI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN YANG MASIH MENEMUKAN KELEMAHAN DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH, ANTARA LAIN BELUM OPTIMALNYA PENDATAAN OBJEK PAJAK DAN PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.

TEMUAN TERSEBUT HENDAKNYA MENJADI PERHATIAN SERIUS AGAR POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TIDAK HILANG DAN PENGELOLAAN PAJAK SEMAKIN AKUNTABEL.

PIMPINAN SIDANG DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

RETRIBUSI DAERAH

SELAIN PAJAK DAERAH, FRAKSI PARTAI GERINDRA JUGA MEMBERIKAN PERHATIAN TERHADAP CAPAIAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI SALAH SATU KOMPONEN PENTING PENDAPATAN ASLI DAERAH.

BERDASARKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025, REALISASI RETRIBUSI DAERAH MASIH BELUM MENCAPAI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.

FRAKSI PARTAI GERINDRA BERPANDANGAN BAHWA KONDISI TERSEBUT MENUNJUKKAN MASIH ADANYA POTENSI PENDAPATAN

YANG BELUM TERGALI SECARA OPTIMAL. OLEH KARENA ITU, PEMERINTAH DAERAH PERLU MELAKUKAN EVALUASI SECARA MENYELURUH TERHADAP MEKANISME PEMUNGUTAN, KUALITAS PELAYANAN, AKURASI BASIS DATA WAJIB RETRIBUSI, SERTA EFEKTIVITAS PENGAWASAN DI LAPANGAN.

TERHADAP MASING-MASING KELOMPOK RETRIBUSI, FRAKSI PARTAI GERINDRA MENYAMPAIKAN PANDANGAN SEBAGAI BERIKUT.

PERTAMA, RETRIBUSI JASA UMUM.

REALISASI RETRIBUSI JASA UMUM MENUNJUKKAN CAPAIAN YANG RELATIF LEBIH BAIK DIBANDINGKAN KELOMPOK RETRIBUSI LAINNYA. HAL TERSEBUT MENUNJUKKAN BAHWA PELAYANAN PUBLIK YANG MENJADI OBJEK RETRIBUSI TELAH BERJALAN CUKUP BAIK. MESKIPUN DEMIKIAN, PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT TETAP HARUS MENJADI PRIORITAS AGAR PENERIMAAN RETRIBUSI DAPAT TERUS MENINGKAT TANPA MENAMBAH BEBAN MASYARAKAT.

KEDUA, RETRIBUSI JASA USAHA.

FRAKSI PARTAI GERINDRA MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS TERHADAP RENDAHNYA REALISASI RETRIBUSI JASA USAHA. RENDAHNYA CAPAIAN TERSEBUT MENUNJUKKAN BAHWA PEMANFAATAN ASET DAERAH MAUPUN PELAYANAN JASA YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH BELUM MEMBERIKAN KONTRIBUSI OPTIMAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH.

PEMERINTAH DAERAH PERLU MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP PEMANFAATAN ASET, TARIF LAYANAN, TINGKAT PEMANFAATAN FASILITAS DAERAH, SERTA MENINGKATKAN PROFESIONALISME PENGELOLAAN ASET AGAR MAMPU MEMBERIKAN MANFAAT EKONOMI YANG LEBIH BESAR BAGI DAERAH.

KETIGA, RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

REALISASI RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU YANG MASIH JAUH DARI TARGET MENUNJUKKAN PERLUNYA PENYEMPURNAAN SISTEM PELAYANAN PERIZINAN, PEMBARUAN BASIS DATA OBJEK RETRIBUSI, SERTA PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR PERANGKAT DAERAH. PELAYANAN PERIZINAN YANG CEPAT, MUDAH, DAN TRANSPARAN AKAN MENDORONG MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT SEKALIGUS MEMPERBAIKI IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN KUNINGAN.

FRAKSI PARTAI GERINDRA JUGA MENCERMATI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN YANG MASIH MENEMUKAN KELEMAHAN DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH, ANTARA LAIN ADMINISTRASI YANG BELUM TERTIB, PENDATAAN OBJEK RETRIBUSI YANG BELUM OPTIMAL, SERTA LEMAHNYA PENGAWASAN TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI.

TEMUAN TERSEBUT HENDAKNYA DIJADIKAN MOMENTUM UNTUK MEMPERKUAT SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEHINGGA PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH MENJADI LEBIH AKUNTABEL, TRANSPARAN, DAN MAMPU MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG LEBIH BESAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH.

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

FRAKSI PARTAI GERINDRA MENGAPRESIASI CAPAIAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN YANG MAMPU MEMENUHI TARGET.

NAMUN DEMIKIAN, PEMERINTAH DAERAH PERLU TERUS MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH AGAR PENYERTAAN MODAL YANG TELAH DIBERIKAN BENAR-BENAR MAMPU MENGHASILKAN DIVIDEN YANG OPTIMAL, MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG LEBIH BESAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH.

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

FRAKSI PARTAI GERINDRA MENCERMATI BAHWA KELOMPOK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH SECARA UMUM MENUNJUKKAN CAPAIAN YANG CUKUP BAIK.

NAMUN DEMIKIAN, PEMERINTAH DAERAH TETAP PERLU MENGOPTIMALKAN SELURUH SUMBER PENDAPATAN YANG BERASAL DARI JASA GIRO, HASIL KERJA SAMA DAERAH, PEMANFAATAN ASET, SERTA PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AGAR MAMPU MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG LEBIH BESAR TERHADAP KAPASITAS FISKAL DAERAH.

PIMPINAN SIDANG DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

PENDAPATAN TRANSFER

FRAKSI PARTAI GERINDRA MENCATAT BAHWA PENDAPATAN TRANSFER MASIH MENJADI KOMPONEN TERBESAR DALAM STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN.

KONDISI TERSEBUT MENUNJUKKAN BAHWA KEMAMPUAN FISKAL KABUPATEN KUNINGAN MASIH SANGAT DIPENGARUHI OLEH KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

OLEH KARENA ITU, FRAKSI PARTAI GERINDRA BERPANDANGAN BAHWA PENGUATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH HARUS MENJADI AGENDA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN SEHINGGA SECARA BERTAHAP KETERGANTUNGAN TERHADAP DANA TRANSFER DAPAT DIKURANGI.

DI SISI LAIN, PEMERINTAH DAERAH JUGA PERLU TERUS MEMPERKUAT KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH PROVINSI AGAR HAK-HAK KEUANGAN DAERAH DAPAT DITERIMA SECARA TEPAT WAKTU SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.

PIMPINAN SIDANG DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

BELANJA DAERAH

SETELAH MENCERMATI SISI PENDAPATAN FRAKSI PARTAI GERINDRA SELANJUTNYA MEMBERIKAN PANDANGAN TERHADAP PELAKSANAAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BERDASARKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025, BELANJA DAERAH DIANGGARKAN SEBESAR RP 2.919 TRILIUN DAN TEREALISASI SEBESAR RP 2.696 TRILIUN ATAU MENCAPAI 92,37 PERSEN DARI ANGGARAN. CAPAIAN TERSEBUT MENUNJUKAN BAHWA SECARA UMUM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TELAH BERJALAN DENGAN BAIK.

FRAKSI PARTAI GERINDRA BERPANDANGAN BAHWA KEBERHASILAN PELAKSANAAN APBD TIDAK HANYA DIUKUR DARI TINGGINYA TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN, TETAPI JUGA DARI KUALITAS HASIL PEMBANGUNAN YANG DAPAT DIRASAKAN SECARA NYATA OLEH MASYARAKAT.

BELANJA DAERAH HENDAKNYA BENAR-BENAR DIARAHKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, MEMPERKUAT SEKTOR PERTANIAN, MENDORONG PERTUMBUHAN UMKM, MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN, SERTA MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA YANG LEBIH LUAS.

FRAKSI PARTAI GERINDRA MENGAPRESIASI REALISASI BELANJA DAERAH YANG SECARA UMUM MENUNJUKKAN KINERJA YANG BAIK. NAMUN DEMIKIAN, PEMERINTAH DAERAH PERLU TERUS MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN, KETEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN, SERTA EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN AGAR MANFAAT APBD BENAR-BENAR DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT.

FRAKSI PARTAI GERINDRA JUGA MENCERMATI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN YANG MASIH MENEMUKAN BEBERAPA KELEMAHAN DALAM PENGELOLAAN BELANJA DAERAH, ANTARA LAIN PADA ASPEK ADMINISTRASI, KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN, PENGENDALIAN INTERN, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN.

WALAUPUN SEBAGIAN BESAR TEMUAN TELAH DITINDAKLANJUTI, FRAKSI PARTAI GERINDRA MENILAI BAHWA PEMBENAHAN SISTEM HARUS MENJADI PRIORITAS AGAR PERMASALAHAN SERUPA TIDAK TERULANG PADA TAHUN-TAHUN MENDATANG.

PEMBIAYAAN DAERAH

FRAKSI PARTAI GERINDRA BERPANDANGAN BAHWA KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH HARUS DILAKSANAKAN SECARA HATI-HATI (*PRUDENT*), MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, SERTA DIARAHKAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN YANG MEMBERIKAN MANFAAT JANGKA PANJANG BAGI MASYARAKAT.

SETIAP KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, TERMASUK PINJAMAN DAERAH, HENDAKNYA DILAKUKAN SECARA SELEKTIF DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN FISKAL DAERAH SERTA KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN.

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

FRAKSI PARTAI GERINDRA MENCERMATI BAHWA SILPA TAHUN ANGGARAN 2025 PERLU MENJADI BAHAN EVALUASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN APBD.

SILPA YANG TERLALU BESAR DAPAT MENUNJUKKAN ADANYA PROGRAM YANG BELUM TERLAKSANA SECARA OPTIMAL ATAUPUN PERENCANAAN YANG BELUM SEPENUHNYA AKURAT. SEBALIKNYA, SILPA YANG BERASAL DARI EFISIENSI ANGGARAN TENTU

MERUPAKAN HAL YANG POSITIF SEPANJANG TIDAK MENGURANGI KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

OLEH KARENA ITU, FRAKSI PARTAI GERINDRA MENDORONG PEMERINTAH DAERAH AGAR TERUS MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGENDALIAN ANGGARAN SEHINGGA SETIAP RUPIAH APBD BENAR-BENAR MEMBERIKAN MANFAAT YANG SEBESAR-BESARNYA BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN.

PIMPINAN SIDANG DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

KESIMPULAN

SETELAH MENCERMATI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2025 BESERTA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, FRAKSI PARTAI GERINDRA MENYAMPAIKAN BEBERAPA KESIMPULAN SEBAGAI BERIKUT.

PERTAMA, FRAKSI PARTAI GERINDRA MENGAPRESIASI KEBERHASILAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN YANG MAMPU MENINGKATKAN OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DARI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP) PADA TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) PADA TAHUN ANGGARAN 2025.

CAPAIAN TERSEBUT MENUNJUKKAN ADANYA KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMPERBAIKI TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH SERTA MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

NAMUN DEMIKIAN, FRAKSI PARTAI GERINDRA BERPANDANGAN BAHWA OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN BUKANLAH TUJUAN AKHIR, MELAINKAN AWAL DARI KOMITMEN UNTUK TERUS MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

MEMPERKUAT SISTEM PENGENDALIAN INTERN, MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK, SERTA MEMASTIKAN SETIAP RUPIAH APBD MEMBERIKAN MANFAAT NYATA BAGI MASYARAKAT.

KEDUA, FRAKSI PARTAI GERINDRA MENILAI BAHWA KINERJA PENDAPATAN DAERAH SECARA UMUM MENUNJUKKAN CAPAIAN YANG CUKUP BAIK. AKAN TETAPI, UNTUK PENDAPATAN AASLI DAERAH CAPAIAN REALISASI MASIH JAUH DARI TARGET YANG DI ANGGARKAN SEHINGGA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MASIH HARUS MENJADI PERHATIAN UTAMA PEMERINTAH DAERAH AGAR TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN KUNINGAN SEMAKIN MENINGKAT.

KETIGA, FRAKSI PARTAI GERINDRA BERPANDANGAN BAHWA KUALITAS BELANJA DAERAH HARUS TERUS DITINGKATKAN SEHINGGA BENAR-BENAR MAMPU MENDUKUNG PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS, MEMPERKUAT PELAYANAN DASAR, MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH, SERTA MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

KEEMPAT, FRAKSI PARTAI GERINDRA MEMINTA AGAR SELURUH REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEGERA DITINDAKLANJUTI SECARA MENYELURUH SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN PADA TAHUN-TAHUN MENDATANG.

CATATAN FRAKSI PARTAI GERINDRA

SEBAGAI BENTUK KOMITMEN DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN BAIK, FRAKSI PARTAI GERINDRA MENYAMPAIKAN BEBERAPA CATATAN SEBAGAI BERIKUT.

PERTAMA, PEMERINTAH DAERAH PERLU TERUS MEMPERKUAT KEMANDIRIAN FISKAL MELALUI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH, KHUSUSNYA DARI SEKTOR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH, DENGAN DIDUKUNG BASIS DATA YANG AKURAT, PELAYANAN YANG SEMAKIN BAIK, DIGITALISASI SISTEM PEMUNGUTAN, SERTA PENGAWASAN YANG LEBIH EFEKTIF TERHADAP SELURUH POTENSI PENERIMAAN DAERAH.

KEDUA, PEMERINTAH DAERAH PERLU TERUS MENINGKATKAN KUALITAS BELANJA DAERAH AGAR LEBIH BERORIENTASI PADA HASIL (*OUTCOME*) DAN MANFAAT (*IMPACT*), KHUSUSNYA DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PELAYANAN KESEHATAN, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENGUATAN SEKTOR PERTANIAN, PENGEMBANGAN UMKM, PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA, SERTA PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN.

KETIGA, FRAKSI PARTAI GERINDRA BERHARAP SINERGI ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TERUS DIPERKUAT DALAM SEMANGAT KEMITRAAN YANG SALING MENDUKUNG, SALING MENGINGATKAN, DAN SALING MENGUATKAN DEMI MEWUJUDKAN KABUPATEN KUNINGAN YANG MELESAT, YAITU MAJU, LESTARI, EMPOWERING, AGAMIS, DAN TANGGUH, SEBAGAIMANA MENJADI ARAH PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERORIENTASI PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

PIMPINAN SIDANG, SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

FRAKSI PARTAI GERINDRA MEYAKINI BAHWA APBD BUKAN SEKADAR DOKUMEN KEUANGAN DAERAH, MELAINKAN INSTRUMEN PEMBANGUNAN YANG HARUS MAMPU MENGHADIRKAN HARAPAN, MEMPERKUAT KEMANDIRIAN DAERAH, MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI, SERTA MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN BAGI SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN.

AKHIRNYA, DENGAN MEMOHON RIDHA ALLAH *SUBHANAHU WAA TA'ALA*, TUHAN YANG MAHA ESA, SEMOGA SELURUH IKHTIAR KITA

DALAM MENGELOLA KEUANGAN DAERAH SENANTIASA DIBERIKAN PETUNJUK, KEKUATAN, DAN KEBERKAHAN, SEHINGGA MAMPU MENGHADIRKAN PEMBANGUNAN YANG SEMAKIN BERKUALITAS DAN KESEJAHTERAAN YANG SEMAKIN DIRASAKAN OLEH SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN.

DEMIKIAN KIRANYA PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2025. PEMBAHASAN LEBIH MENDALAM DAPAT KAMI SAMPAIKAN BERSAMA UTUSAN FRAKSI GERINDRA DI BADAN ANGGARAN. TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA DAN MOHON MAAF APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN. SEMOGA ALLAH *SUBHANAHU WAA TA'ALA* SENANTIASA MEMBERIKAN BIMBINGAN SERTA HIDAYAH-NYA KEPADA KITA SEMUA. AAMIIN.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

KUNINGAN, 3 JULI 2026

**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

KETUA



TOTO TOHARI, S.E



SEKERTARIS



H. EMAN SUHERMAN, SH., MH

